
Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi

Ruli Andriansah

Mahasiswa S1 Antropologi Budaya 2021
Email: ruli.andriansah@mail.ugm.ac.id

Identitas Buku

Judul Buku

Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi

Judul Asli

Indonesia: State and Society in Transition

Penulis

Jemma Purdey, Antje Missbach, dan Dave McRae

Penerjemah

Muhamad Haripin

Penerbit dan Tahun Terbit

Marjin Kiri, 2023

Halaman Buku

x + 402 hlm



Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 yang terselenggara lima tahun sekali, sudah semestinya kita memperbarui amunisi pengetahuan untuk menyikapi kondisi Indonesia hari ini dan kedepannya. Barangkali, buku *Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi* yang diterjemahkan oleh Muhamad Haripin dari judul asli *Indonesia: State and Society in Transition*, yang ditulis dalam kolaborasi tiga ilmuwan dengan dua latar belakang ilmu yakni sosiologi (Antje Missbach) dan ilmu politik (Jemma Purdey & Dave McRae) mampu menjadi referensi tambahan terkait studi sosial-politik Indonesia pasca Orde Baru. Dalam pembacaan buku ini, terdapat tiga aspek penting yang mampu saya tawarkan pada kawan-kawan. Pertama, buku ini merupakan kerja panjang dan kolaboratif para penulis dalam mengamati situasi negara dan masyarakat Indonesia dalam dua dekade terakhir pasca reformasi (hlm; ix). Kedua, buku ini merangkum gambaran umum Indonesia dalam satu jilid, mulai dari kesejarahan Indonesia sebelum dan setelah proklamasi, situasi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan dinamika masyarakat Indonesia di dalamnya (hlm; ix). Ketiga, tawaran kajian buku ini dilengkapi pula oleh paparan data mikro dan fenomena dalam kliping media massa di Indonesia, namun kurangnya, data-data mikro tersebut tidak diuraikan lebih lanjut sehingga terasa sebagai tempelan saja. Atas dasar pertimbangan ketiga penilaian pribadi tersebut, buku ini

bisa menjadi pilihan bacaan anda. Saya memilih mengulas buku ini, karena keingintahuan saya sebagai pembaca awam yang ingin mempelajari kajian sosial-politik Indonesia setelah reformasi dalam satu waktu singkat, sehingga buku ini pantas dijadikan pijakan awal yang kiranya bisa merangkum aspek luasnya penceritaan demokrasi di Indonesia.

Catatan demi catatan dalam buku ini bukanlah karangan etnografi yang memfokuskan pada studi wilayah tertentu, tetapi kiranya buku ini dapat memberikan detail terkait peristiwa-peristiwa utama dalam transisi demokrasi Indonesia. Selain itu pembahasan buku ini tidaklah eksklusif, sebab ada banyak yang bisa dipancing dengan mata kail keilmuan lainnya. Hal itu membuat buku ini layak glosarium yang dapat dinukil dari sisi mana pun. Tetapi sedikit yang disayangkan dari buku ini adalah, tidak konsistennya pemberian porsi kesimpulan pada setiap akhir bab sehingga koherensi antar bab satu dengan yang lainnya tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Kita mulai dari kulit buku, kover edisi terjemahan ini terasa lebih hidup karena memasukkan potret demonstrasi di Indonesia sebagai latar pendukung visual yang 'terasa hidup' jika dibandingkan dengan versi Inggrisnya. Namun dari segi tipografi, saya rasa ada yang kurang tepat pada pemilihan font dan komposisi warna. Kurang tebalnya font dan pengambilan warna gelap, menjadikan tulisan kover depan buku ini kurang menarik dibaca karena bertabrakan dengan latar siluet gedung pencakar langit. Sementara bagian *blurb*-nya, saya kira buku ini sudah cukup terang memberi penjelasan terkait isi di dalamnya. Kemudian untuk ukuran badan buku, ketebalan, dan lem yang digunakan cukup kuat. Tiga faktor itu menjadikan buku ini secara fisik menjadi solid dan terasa premium sebab kertas-kertasnya tidak mudah tercopot dari *soft cover*-nya.

Memasuki pada konteks pendalaman bacaan, sembilan bab buku ini hadir dengan pisau bedah sosial-politik terhadap kompleksitas fakta-fakta sejarah dan sejumlah temuan kontemporer. Mengangkat pada bab delapan, dijelaskan peran media dan budaya populer yang memperlihatkan kondisi terkini dari penggunaan teknologi komunikasi yang semakin masif di masyarakat kita. Pemanfaatan teknologi komunikasi pasca reformasi itu kian meluas dengan kemunculan stasiun televisi baik nasional ataupun swasta, stasiun radio, serta ragam medium daring yang bermain atas kompleksitas narasi demokrasi. Dengan banyaknya pilihan media untuk mendukung keterbukaan ekspresi tersebut, di sisi lain kondisi itu lantas mendorong persaingan antar publik yang menyebabkan instabilitas sosial (hlm. 262). Penulis buku ini juga menyoroti kerentanan berita publik yang seringnya terdemokratisasi dengan tidak wajar, yaitu ketika terciptanya narasi dominan sebab dukungan politik uang dari para oligarki tua yang malah menghambat tercapainya kebebasan berekspresi. 'Terhambat' dalam konteks ini tidak hanya pada keseragaman konten yang diproduksi oleh media besar, tetapi menurut saya juga menghambat kesadaran dan kedewasaan masyarakat kita dalam bermedia. Mereka—para oligarki—yang disebut oleh penulis buku ini telah melakukan "kartelisasi media" sebagai remot kontrol untuk memproduksi wacana dan secara tegas mendominasi dengan tayangan yang hanya mendukung bisnis mereka, sehingga masyarakat Indonesia mau tidak mau menempuh jalan alternatif untuk menciptakan ekosistem media sendiri walaupun masih jauh dari yang diharapkan (hlm. 264). Artinya, model kontrol media yang dihadapi oleh publik dewasa ini berkuat pada persaingan modal baik secara pengetahuan dan material, karena para oligarki media tersebut jelas memiliki instrumen yang lebih mendukung.

Kemudian perbedaan yang paling mencolok antara kondisi pasca reformasi dengan

rezim Orde Baru terkait kontrol media, yaitu ketika masyarakat memiliki kebebasan berekspresi yang lebih besar meskipun mesti bersaing dengan para pemodal. Kebebasan berbicara di berbagai ruang ini menghasilkan arus pandangan yang tak kalah tendensius, di mana kontestasi secara inheren memperluas potensi ujaran kebencian kepada faksi politik, agama, dan segenap golongan yang diproduksi maupun direproduksi oleh para pemilik modal maupun masyarakat itu sendiri. Sementara kontrol media sewaktu Orde Baru diatur oleh Presiden, anak-anaknya, dan militer yang sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan hari ini, yang mana jika kita amati bersama sungguhlah mengecewakan publik. Selain membahas terkait kepemilikan media dan produksi wacana, bab delapan juga memberi sedikit gambaran terkait gelombang generasi baru yang telah akrab dengan teknologi informasi, suara mereka yang dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi mayoritas dalam wajah demokrasi di Indonesia.

Pada bagian awal, bab satu hingga empat, buku ini difokuskan untuk menengok arus sejarah Indonesia sembari mempertanyakan dinamika demokrasi Indonesia semasa berbenah. Ada tiga bagian yang menjadi fokus utama dalam empat bab tersebut. Pertama, kontinuitas Indonesia sebagai salah satu pelopor demokrasi di Asia Tenggara; kedua, sejarah Indonesia Pra-Kemerdekaan dan ketiga, bayangan otoritarianisme dalam politik desentralisasi pasca reformasi. Dari ketiga bagian itu, buku ini mencoba mengarahkan pembaca pada pembabakan pondasi sebelum masuk pada pembahasan yang lebih khusus. Adapun pada bab pertama, penulis lebih menekankan perhatian mereka pada asumsi-asumsi terhadap negara demokrasi, karena sebagaimana negara demokrasi yang masih bertransisi, Indonesia memiliki banyak kemungkinan untuk tetap sebagai pelopor demokrasi ataupun sebaliknya.

Kelahiran demokrasi awal pasca-otoritarianisme Orde Baru di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan pemilu dan berakhirnya sentralisasi kekuasaan di pusat ibukota. Negara menyerahkan wewenang ke pemerintahan lokal/daerah untuk melakukan pemilihan terbuka. Undang-undang desentralisasi disahkan dan penentuan aktor legislatif dan eksekutif semua tingkatan dikerjakan oleh daerah. Namun, dalam proses desentralisasi kekuasaan, negara tidak lepas dari beragam persoalan seperti pemenuhan hak asasi manusia (HAM), pendidikan, kependudukan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja (bab empat). Amandemen undang-undang desentralisasi ini memberi efek sosiologis-kultural yang dahsyat, ancaman disintegrasi karena kebangkitan demokrasi sipil itu tidak diperkirakan oleh pemerintah yang pada akhirnya menuai segelintir persoalan demokrasi. Konflik dan kekerasan komunal bermunculan karena gejolak sipil-militer yang diwariskan oleh pemerintah Orde Baru. Dikarenakan situasi transisi konstitusional itu dilihat sebagai kesempatan naik kelas bagi masyarakat sipil, sementara militer yang sudah kadung menubuh dalam birokrasi dan sektor-sektor lain menganggap transisi demokrasi adalah ancaman pemutusan dana negara. Mereka—militer—yang telah lama menikmati privilese semasa Orde Baru dikepung ketidakpastian sebab hak-hak spesial mereka segera dicabut (hlm. 117).

Pada bab empat, dijelaskan juga terkait ketegangan politik yang berujung pada tindak kekerasan dan separatisme, contohnya di kantong-kantong wilayah besar seperti Kalimantan dan Maluku, atau daerah yang ingin melepaskan diri (Aceh, Timor-Timor, dan Papua) yang saat itu menjadi simalakama transisi demokrasi. Meletusnya perang Dayak dan Madura di Kalimantan, misalnya, menjadi catatan hitam bagi negara sebab

banyaknya korban yang berjatuh. Namun penulis memberi saran bahwa konflik yang terjadi di Kalimantan antara Dayak dan Madura alangkah baiknya dikaji dengan perspektif lain, misalnya dengan mempelajari kesejarahan suatu tempat, dikarenakan konflik Dayak-Madura sudah terjadi bahkan sebelum Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 (hlm.119). Dalam hal ini, untuk mendapatkan berbagai perspektif kedaerahan, kita bisa saja melihat bagaimana para antropolog bekerja dengan metode etno-histori, yaitu pengkajian sejarah suatu wilayah dengan pemanfaatan berbagai jenis dokumen yang dihasilkan oleh non-atropolog yang mana kemudian direkognisi dengan konteks suatu wilayah (Sturtevant, 1966).

Pembahasan sejarah Indonesia dalam buku ini memang berfokus pada peristiwa-peristiwa utama yang menjadi tonggak transisi demokrasi, misalnya di bab tiga bagian awal mengenai demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang dijelaskan sekilas saja, sehingga buku ini menyisakan berbagai pertanyaan terkait sub-bab yang dipilih. Terkait hal itu, penulis mengambil sudut jelajah yang polanya juga kita temukan pada bab-bab selanjutnya. Baik demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin, persoalannya ialah otoritarianisme dan keotonomian daerah. Terlebih orang-orang yang bertengger secara politis pada masa demokrasi terpimpin adalah tokoh-tokoh sebelumnya saat demokrasi liberal berkuasa. Soekarno sebagai kepala negara fokus pada penguatan-penguatan ideologis negara, sementara ia terhimpit oleh dua kekuatan besar yaitu Militer dan PKI yang sama-sama bersitegang merebut pengaruh dan kekuasaan Soekarno (hlm. 63-64). Begitu pun saat Orde Baru memimpin hingga paska reformasi; warisan politik kekerabatan, patronase, korupsi, dan pragmatisme politik uang untuk meraih elektabilitas partai politik (parpol) menjadi patologi dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Pada bab lima, penulis menjelaskan implementasi struktur politik era demokrasi. Dimulai dengan pengupasan mekanisme desentralisasi yang sebelumnya dibahas pada bab empat terkait dampak pengesahan undang-undangnya. Dalam bab ini penulis secara runut menjabarkan aspek-aspek yang membentuk politik demokrasi di Indonesia, yaitu desentralisasi, pemilihan umum, partai politik, dan patronase (hlm. 128). Jikalau relasi sipil-militer yang disoroti pada bab empat menimbulkan guncangan stabilitas negara karena adanya kelonggaran keamanan, situasi tersebut justru dijadikan momentum oleh pihak-pihak yang belum pernah mencicipi kekuasaan untuk mendulang kekayaan di daerah masing-masing. Korupsi mulai menjangkiti tubuh-tubuh lokal yang ditandai dengan kemunculan elit-elit kecil yang mendapatkan intensif dari perizinan di berbagai sektor ekonomi pasar. Mereka dan perusahaan bersekongkol mengeksploitasi hutan, membuka pertambangan dan intensifikasi sawit yang mana menjadi komoditi paling seksi untuk dikangkangi (hlm. 133). Bisa dikatakan bayaran dari kebijakan otonomi ini atas kesetiaan daerah kepada negara, ialah mengakarnya mental predatoris pada birokrat lokal. Meskipun pemerintah pusat sempat melakukan resentralisasi melalui amandemen undang-undang, akan tetapi hal itu tidaklah berdampak signifikan. Termasuk dalam politiknya, misalnya dalam pemilu, karena politik desentralisasi dinilai menguntungkan; penulis buku ini menduga bahwa kemudi politik Indonesia akan terus mengarah ke sana (hlm. 137). Di satu sisi, ketika lintasan politik Indonesia menuju pada upaya-upaya peningkatan popularitas pemilu, maka tidak menutup kemungkinan model-model demokrasi kedaerahan yang parokial juga menguat dan berpotensi memperlebar jurang antara yang pusat dan yang daerah.

Proyek desentralisasi ini, seperti yang telah dibahas di bab empat, memang tidak lepas dari konsekuensi. Misalnya dalam pemilu, yang semulanya pada era Orde Baru adanya pembatasan jumlah parpol, kini publik secara terbuka berpartisipasi dan melegalkan segala cara untuk menarik suara simpatisan. Parpol dengan bermacam latar belakang ideologis sepenuhnya digunakan sebagai alat legitimasi kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Pada strategi pengaturan alokasi untuk merebut kursi-kursi pemerintahan, tak ayal model politik identitas dimainkan secara tidak wajar. Artinya, ragam etnis, suku, dan keunikan kelompok di Indonesia diletakkan di luar zona institusi tradisional mereka. Meskipun hal ini juga sudah dikenali sejak lama ketika nasionalisme Indonesia mulai bertumbuh dan terbayang karena efek koneksitas aneka ragam budaya, bahasa, serta adanya pengalaman senasib atas kolonialisme (Anderson 2001). Hal ini juga senada dengan Ekholm (1980) bahwa suatu bangsa secara otonom tidaklah dibangun dengan sifat-sifat lokal melainkan mengglobal, tetapi itu sesuatu yang berbeda terkait partai politik, sebab dalam praktiknya, parpol nasional ini telah mengamputasi kepercayaan publik karena mereka dianggap gagal merefleksikan cita-cita masyarakat luas.

Gagalnya cita-cita masyarakat luas terhadap eksistensi parpol nasional juga berkaitan dengan dinamika politik demokrasi pasca reformasi yang tidak hanya berfokus pada elektabilitas namun lupa terhadap sejumlah persoalan di lapangan (refleksi bab lima). Dalam bab enam dan tujuh, buku ini mengurai domino pada ketimpangan sosial dan kasus-kasus HAM di masa lalu. Sebagaimana Orde Baru dan selepasnya, terdapat segelintir aktor-aktor lama yang aktif dalam politik Indonesia kontemporer enggan melihat kembali coretan berdarah itu, mereka berdalih bahwasanya negara sebaiknya berfokus pada tindak pencegahan agar tidak terjadi kejadian serupa (hlm. 260). Menurut penulis buku ini, hal tersebut jelas tidak masuk akal, karena faktanya hingga hari ini publik ataupun para penyintas belum mendapat kejelasan dan malahan semakin banyak kasus bertumbuhan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu juga dipertegas dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, misalnya yang baru-baru ini seperti kasus Kanjuruhan yang menelan 131 korban jiwa. Dalam bab tujuh penulis juga menyoroti bagaimana posisi pembela hak asasi manusia dan komunitas-komunitas minoritas yang kurang diuntungkan karena situasi demokrasi dan adanya tekanan-tekanan dari gerakan konservatisme baik di dalam maupun di luar tubuh pemerintah (hlm. 261).

Terakhir, buku ini memaparkan peran Indonesia di dunia internasional ditambah epilog mengenai Covid-19 yang sempat melumpuhkan dunia. Partisipasi Indonesia dalam dunia internasional belum dapat dikatakan maksimal karena masih dalam transisi fokus pandangan negara dari rezim Orde baru yang semula non-kosmopolit ketika Soeharto memimpin (hlm. 303). Melihat kondisi pasca reformasi dan terlepas negara ini memiliki kawasan dengan letak geografis yang strategis, penulis buku ini cukup percaya bahwa nantinya Indonesia dengan kapabilitasnya akan meraih banyak kepercayaan politik internasional, terlebih lagi ketika Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif (hlm. 349). Sementara ketika pandemi Covid-19, sebelum Indonesia akhirnya menyusul negara-negara lainnya, muncul sikap penangkalan dari pemerintah dan penyerangan ke ahli yang justru memperburuk keadaan. Andai waktu itu tidak ada partisipasi dari komunitas lokal, inisiatif-inisiatif kecil, atau solidaritas organik; mungkin saja Indonesia telah mengalami kejatuhan yang lebih dalam (hlm. 357). Artinya, di tengah kebimbangan titik arah demokrasi kita, ada juga situasi di mana rasa persatuan nasional

tidak hanya dibahasakan melalui ikrar tetapi terimplementasi karena adanya kolektif sepenanggungan.

Sebagai karya terjemahan, penuturan buku ini cukup mengalir meski dibutuhkan usaha lebih untuk menemukan poin utamanya. Kendati fokus di buku ini terpecah-pecah agaknya membuat kita sulit mencari titik premisnya (setidaknya bagi saya sendiri), namun benang merahnya bisa hadirin pembaca tarik dari pergolakan politik pasca reformasi. Oleh sebab itu, saya mencoba mendedahkan buku ini berdasarkan kesinambungan tema di antar babnya, maka tidak ada panduan pasti untuk mulai membacanya dari bab berapa. Saya merasa buku ini dirancang agar pembaca lebih leluasa memilih bagian yang diinginkan kemudian merefleksikan dan mengaitkannya dengan sumber-sumber lain. Dengan demikian, buku ini tidak bisa dikatakan sebagai jalan pintas untuk mengetahui kompleksitas demokrasi kita, tetapi lebih tepatnya sebagai pengantar kepada bacaan-bacaan selanjutnya.

Pada akhirnya buku ini berhasil memenuhi tugasnya jika menjawab bab delapan, yaitu memberi gambaran umum soal kelahiran generasi baru yang belajar situasi demokrasi pasca reformasi melalui kebangkitan internet dan media populer. Generasi seperti saya yang tidak bisa menyaksikan gejolak transisi demokrasi bisa sedikit belajar melalui perangkat-perangkat yang tersedia. Di tengah keberlimpahan akses tersebut, kami setidaknya bisa lebih kritis lagi dalam melihat, terlebih ketika demokrasi kita dikeroposkan dan digoyahkan oleh politik praktis, bahkan yang sungguh kita sesalkan bersama belakangan ini, yaitu jawaban pemerintah atas seruan para akademisi dan guru besar universitas. Sikap pemerintah di rezim ini sungguh jelas mencoreng marwah demokrasi, pemerintah tidak belajar dari situasi pada awal-awal pandemi ketika mereka menyepelkan para ahli dan hasil riset ilmiah. Pemerintah menganggap apa yang dikatakan oleh para guru besar dan sivitas akademik itu hanya muatan politis yang nihil substansi, tentu ini sungguh membahayakan bagi demokrasi kita sebab universitas atau institusi pendidikan adalah benteng terakhir dari narasi-narasi anti kepakaran yang kian hari makin mengganas. Apa yang kita saksikan hari ini jelas terukir dalam sejarah transisi demokrasi Indonesia, baik pemerintah atau pun masyarakat sudah semestinya bertugas merawat dan mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan bersih.

Referensi

- Anderson, Ben. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist Press.
- Ekholm, Kajsas. 1980. On The Limitations of Civilization: The Structural and Dynamics of Global Systems. *Dialectical Anthropology*, 5(2): 155–166 <http://www.jstor.org/stable/29789996>.
- Sturtevant, William. C. 1966. Anthropology, History, and Ethnohistory. *Ethnohistory*, 13(1/2): 1–51 <http://www.jstor.org/stable/480777>.